

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten ROHIL)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**



OLEH :

ARTUDIANTO

NIM. 10424025084

PROGRAM : S 1

JURUSAN : JS/PIDANA DAN POLITIK ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

ABSTRAK

Kebersihan suatu wilayah merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rohil merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peranan di dalam pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah Kabupaten Rohil. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut, diperlukan biaya operasional, yang dimana salah satu sumber biaya operasional tersebut berasal dari pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi, diperlukan partisipasi masyarakat secara menyeluruh didalam proses pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Partisipasi masyarakat di Kota Bagansiapiapi umumnya dan khususnya di Kelurahan Bagan Timur dalam pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, masih rendah. Pengamatan penulis, kesadaran masyarakat khususnya di Kelurahan Bagan Timur sebagai salah satu kelurahan di Bagansiapiapi, masih rendah. Beberapa diantaranya partisipasi dalam membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan gotong-royong kebersihan, membuang sampah pada waktu tempat yang sudah disediakan.

Adanya fenomena di atas, menarik penulis untuk melakukan penelitian guna melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 serta tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007; *Kedua*, bagaimana dampak partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007; dan *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.

Metode penelitian ini adalah peneliti lapangan (*field research*), mengambil lokasi di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapatlah diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, dapat dikatakan masih rendah, seperti membayar retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan, dan membantu membersihkan sampah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan.

Dampak partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, meskipun telah berpengaruh terhadap peningkatan PAD yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, namun pendapatan PAD Retribusi yang diraih Pemda Rokan Hilir lebih dominan merupakan hasil kerja keras Pemerintah Daerah dan belum menjadi budaya masyarakatnya dalam pembayaran Retribusi. Untuk mengumpulkan PAD Retribusi Pemda Rokan Hilir menyediakan segala fasilitas kebersihan seperti tenaga kebersihan, tempat pembuangan sampah yang tidak sedikit, karena hanya kecil masyarakat yang ikut berpartisipasi membayar retribusi persampahan/kebersihan, membersihkan sampah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan.

Partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, yaitu membayar retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan salah satu bentuk kewajiban sesama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurut pandangan hukum Islam, wujud dari partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerjasama yang dianjurkan syara' yang disebut dengan pembayaran retribusi.

D. Susunan Struktur Dinas Pasar dan Pertamanan.....	23
BAB III PERDA No. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI	
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	26
.....	
A. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan	26
.....	
B. Sejarah Perda No. 3 Tahun 2007.....	28
C. Prinsip Perda No. 3 Tahun 2007.....	37
D. Kebersihan Lingkungan Dalam Islam.....	38
BAB IV PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG	
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN	
KEBERSIHAN MENURUT HUKUM ISLAM	
.....	46
A. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bagan Timur Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.....	46
B. Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.....	61
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007	70
BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	79
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum nasional sampai keperangkat hukum daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.¹

Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur masalah muamalah, melainkan juga masalah ibadah yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal serta teksnya selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT, berfirman :²

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Pertama, h. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1998), Cet. Ke-1, h. 157.

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat yang kiranya dapat melindungi seseorang dari mara bahaya dipandang berbagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat yang baik. Diantara sederatan aspek kerja sama dan hubungan manusia yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah bersuci (*thaharah*).³

Bersuci adalah memelihara kebersihan yaitu dengan memperhatikan masalah kebersihan lingkungan, dan pada hakekatnya pandangan Islam terhadap kebersihan merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkal oleh agama-agama lain. Karena kebersihan lahir dan bathin adalah sebagian dari iman, oleh karena itu merupakan tindakan yang diwajibkan. Misalnya untuk melaksanakan shalat, sebagaimana shalat itu sendiri merupakan tiang agama, dan tidak akan sah shalat seorang muslim kecuali suci dari hadas pada lahir maupun bathin. Pada lahir harus bersih dari hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan *wudhu*, serta bersih dari hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Sedangkan hadas pada bathin sebenarnya jauh lebih sulit, karena bathin harus dibersihkan dari segala sifat yang tidak diredhai Allah SWT, melainkan harus mensifati atau mengimani sifat Allah yang dikenal dengan sifat 20, yaitu sifat *salbiah*, sifat *nafsia*, sifat *ma'ni* dan sifat *ma'nawiah*. Artinya kebersihan mutlak bagi seorang muslim, karenanya tidak mungkin telah beriman seseorang muslim kecuali telah bersih lahir maupun bathinnya, sebab itu kebersihan lahir dan bathin adalah sebagian dari iman.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan negara, Peraturan Daerah (Perda) ditempatkan sebagai bagian integral dari peraturan nasional, artinya Perda yang tersebar diseluruh pelosok tanah air dikembangkan atas dasar tetap terjaga dan terpelihara keutuhan negara dengan tidak terlupakan

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2002), h. 61.

terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.⁴

Suksesnya suatu Perda atau perangkat hukum lainnya, dalam mengimplementasikannya sudah barang tentu tidak akan terlepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari pelaksanaan peraturan maupun objek pembangunan, sudah sewajarnya turut berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan segala peraturan maupun segala program pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah Daerah didalam menjalankan peraturan termasuk menjalankan pembangunan khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan harus senantiasa mengikutsertakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bintoro Cokro Amidjojo, bahwa tugas pelaksanaan Perda dan menjaga kebersihan lingkungan tidak mungkin dapat terlaksana oleh Pemerintah Daerah sendiri, melainkan diperlukan suatu usaha untuk melibatkan masyarakat”.⁵

Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang memiliki legitimasi sudah barang tentu memikul tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai program-program Pemerintah Daerah, seperti program pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana usaha Pemerintah Daerah untuk membangkitkan peran serta masyarakat dalam menjalankan Perda agar turut menjaga kebersihan lingkungan di daerah khususnya di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun usaha tersebut tergambar dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, dengan struktur besarnya tarif sebagai berikut :

⁴ Y.W. Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-2, h. 12.

⁵ Bintoro Cokro Amidjojo, *Teori Strategis Pembangunan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1993), h. 48.

1. Tempat usaha:

- a. Untuk tempat usaha type U1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan;
- b. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
- c. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- d. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbulan;
- e. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.

2. Tempat umum:

- a. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
- b. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbulan;
- c. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

3. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
- b. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
- c. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorong di tempat yang diizinkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari.

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya di Kota Bagansiapiapi, terutama sejak kehadiran Perda No. 3 Tahun 2007, dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Semenjak Perda ini ditetapkan dan dijalankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil memperoleh penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 4 Januari 2006 dan 17 Januari 2007,

serta pada tanggal 9 Juni 2008 berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden RI melalui Menteri Lingkungan Hidup sebagai kota terbersih.

Namun fenomena sebaliknya, partisipasi masyarakat di Kota Bagansiapiapi umumnya dan khususnya di Kelurahan Bagan Timur dalam pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, masih rendah.

Pengamatan penulis, kesadaran masyarakat khususnya di Kelurahan Bagan Timur sebagai salah satu kelurahan di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir masih rendah, beberapa diantaranya partisipasi dalam membayar retribusi kebersihan dan persampahan, serta partisipasi dalam gotong-royong kebersihan yang dihimbau pemerintah, partisipasi dalam membuang sampah pada waktu tempat yang sudah disediakan.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibidang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana, diharapkan sejak kehadiran Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, merupakan suatu kesenjangan yang bertolak belakang dengan keberhasilan daerah ini yang berhasil meraih penghargaan tertinggi dibidang kebersihan (Adipura) dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian dapat diasumsikan pembayaran retribusi belum menjadi budaya masyarakat daerah ini, bisa jadi pembayaran retribusi baru dibayar ketika petugas jemput bola kepada masyarakat, yakni dijemput baru dibayar. Padahal alangkah lebih baik jika pembayaran retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan di Kab. Rohil umumnya dan di Kelurahan Bagan Timur khususnya menjadi budaya masyarakatnya. Menurut Alaidin Koto, "sebagai sebuah kota yang berhasil meraih penghargaan tertinggi

dibidang kebersihan seharusnya memiliki ciri khas masyarakat yang berbudaya dan integral dengan lingkungan kotanya.⁶

Bilamana budaya masyarakat di Kelurahan Bagan Timur selaras dengan keberhasilan pemerintah tentu keadaan yang semestinya adalah partisipasi masyarakatnya cukup tinggi untuk mendukung program pemerintah dalam pembayaran retribusi kebersihan dan persampahan. Pengertian partisipasi sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah ikut ambil bagian atau ikut serta.⁷ Sedangkan menurut Soegarda Poekwadjaya, "partisipasi adalah perencanaan dan pelaksanaan dan segala sesuatu yang terpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajibannya".⁸

Adanya fenomena di atas, menarik penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007 serta tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat, sesuai dengan tema yang diusung yakni:

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, serta titik permasalahan yang akan diteliti, diperlukan adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan mendekati sasaran yang dikehendaki. Adapun batasan masalah tersebut hanya sebatas partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan

⁶ Alaidin Koto, *Kebanggaan Eksternal di kota Kita*, Riau Tribun Selasa 2 Juni 2008, h.. 6.

⁷ Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1976), h. 303.

⁸ Soegarda Poekwadjaya, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1976), Cet. Ke-2, hal. 251.

Kebersihan, serta tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui secara obyektif dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- b. Mengetahui secara obyektif dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- c. Mengetahui secara obyektif dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis tentang partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir). Selain itu dalam prespektif akademis, sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah UIN SUSKA Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang membutuhkan informasi mengenai partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir), di samping berguna bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian serupa.
- c. Prespektif praktis, jika dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil kebijaksanaan dalam melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Rokan Hilir.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Peneliti ini adalah peneliti lapangan (*field research*), mengambil lokasi di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah mengingat fenomena rendahnya partisipasi masyarakat di lokasi ini terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Selain itu, pertimbangan lainnya yang dirasakan penting adalah berkenaan penulis berasal dan bertempat tinggal di lokasi tersebut tentu akan lebih mudah

berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan pemerintah setempat. Pada akhirnya akan memudahkan dalam pengumpulan data, dengan demikian diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat dan obyektif.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir
- b. Objek penelitian adalah partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan serta tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu-individu yang menjadi subjek penelitian, karena jumlah populasi sebanyak 400 masyarakat, oleh karena keterbatasan dana dan waktu, maka sebagai sampel dalam penelitian ini ditetapkan 50 orang (13 %) dari masyarakat di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, 2 orang dari anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir serta 2 orang dari Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu, yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua katagori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari populasi yang terpilih menjadi sampel (masyarakat di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir), dilakukan dengan wawancara secara terstruktur dan mengajukan angket/kuisisioner tertutup terhadap responden.
- b. Data sekunder, data ini bukan diperoleh secara langsung kepada sumbernya, melainkan peran aktif penulis untuk melakukan studi kepustakaan atau studi dokumenter yang tersedia di Kantor Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Kuisisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan dan telah disediakan jawaban-jawabannya (kuisisioner tertutup).

b. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.

c. Studi dokumen

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan maka penulis membahas dengan cara sebagai berikut :

a. Metode deduktif

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan keterangan serta pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif

Metode ini dilakukan dengan cara mengambil fakta-fakta atau data-data yang relevan dengan penelitian, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

7. Metode analisa data

Data yang penulis peroleh melalui teknik kuisisioner kemudian dikualifikasikan sesuai dengan kelompoknya kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif dan menghubungkannya dengan hukum kewarisan Islam, peraturan perundang-undangan,

konsep, teori, pandangan para ahli serta data lainnya yang keseluruhannya relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulis

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi Latar belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, metode penelitian dan sistematika penulis.
- BAB II** : Berisikan gambaran umum lokasi peneliti yang memuat : Geografis dan demografis lokasi peneliti, Pendidikan dan Agama, Sosial dan Kehidupan Ekonomi, Susunan Struktur Dinas Pasar dan Pertamanan.
- BAB III** : Menguraikan tentang Sejarah Perda No. 3 Tahun 2007, Prinsip Perda No. 3 Tahun 2007, Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan, dan Kebersihan dalam Islam.
- BAB IV** : Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007, bab ini merupakan hasil peneliti di lapangan yang memuat : a. Partisipasi Masyarakat kelurahan Bagan Timur terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 b. Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 d. pandangan Hukum Islam terhadap Partisipasi Masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran : a. Kesimpulan, b. saran-saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis Kelurahan Bagan Timur

1. Geografis

Bagan Timur merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Secara Geografis Kelurahan Bagan Timur memiliki luas $\pm 154,000$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bukit Kapur;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Bagan Kota;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bagan Jawa;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Bagan Huku.

Kelurahan Bagan Timur terdapat empat RW, dan tiap RW membawahi beberapa RT. Setiap RW dipimpin oleh seorang ketua RW, dan saat penelitian ini dilakukan nama-nama ketua RW tersebut adalah:

RW I Ketua RW : Afrizal;

RW II Ketua RW : Usman;

RW III Ketua RW : Toyong; dan

RW IV Ketua RW : Efendi Usman.

Kelurahan Bagan Timur hanya berjarak 3,5 km dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bagansiapi-api, dan dari Kelurahan Bagan Timur ke Ibu Kota Propinsi Riau (Pekanbaru) berjarak lebih kurang 145 km. Sedangkan jarak Kelurahan Bagan Timur dengan ibukota kecamatan hanya berjarak 0,5 km. Sebagian jalan di Kelurahan Bagan Timur sudah diaspal \pm sepanjang 5 km yang membuat hubungan Kelurahan Bagan Timur dengan kelurahan lain

khususnya ke pusat kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten menjadi sangat lancar, apalagi letak pusat kecamatan dipinggir jalan raya lintas timur.

Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko dapat dikatakan salah satu kelurahan yang telah maju di Kecamatan Bangko, ini dapat dibuktikan dengan fasilitas yang ada seperti adanya perkantoran-perkantoran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pelayanan listrik negara, jaringan telepon seluler, penginapan, hotel, restoran, koperasi, mini market dan pabrik industri kayu bangunan, sehingga warga di Kelurahan Bagan Timur tidak lagi ketinggalan dalam informasi dari luar.

Kelurahan Bagan Timur juga merupakan daerah yang subur yang terletak di daerah daratan tinggi dikelilingi oleh tanaman karet dan pemukiman rumah penduduk dan bangunan pertokoan yang terlihat tersusun rapi disepanjang jalan-jalan yang sudah diaspal. Karena pada awalnya Kelurahan Bagan Timur merupakan kelurahan hasil dari program transmigrasi.

2. Demografi

Penduduk Kelurahan Bagan Timur menurut data Tahun 2008 berjumlah 7.965 jiwa, terdiri dari berbagai suku yaitu Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Cina dan Suku Minang. Jumlah penduduk Kelurahan Bagan Timur ditinjau dari segi perbandingan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II. 1 sebagai berikut :

TABEL II. 1
Banyaknya Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Per-RW di Kelurahan Bagan Timur Tahun 2008

No.	Uraian	Penduduk		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	
1.	RW I	718	730	1.448
2.	RW II	690	672	1.362
3.	RW III	553	510	1.063
4.	RW IV	1.323	2.769	4.092
	Jumlah	3.284	4.681	7.965

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan Tabel II. 1 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Timur menurut perbandingan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.681 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 3.284 jiwa. Kemudian jika dilihat jumlah penduduk Kelurahan Bagan Timur menurut suku jumlahnya bervariasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel II. 2 berikut:

TABEL II. 2
Banyaknya Penduduk Menurut Suku di Kelurahan Bagan Timur

No.	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1.	Melayu	5.770	73,53 %
2.	Jawa	842	9,50 %
3.	Cina	692	8,68 %
4.	Batak	68	0,85 %
5.	Minang	593	7,44 %
	Jumlah	7.695	100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Tabel II. 2 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk di Kelurahan Bagan Timur didominasi oleh suku Melayu sebanyak 5.770 jiwa (73,53 %). Sedangkan suku yang paling minoritas yakni suku Batak sebanyak 68 jiwa (0,57 %).

B. Pendidikan dan Keagamaan

1. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia adalah merupakan faktor yang menentukan dalam proses berjalannya sebuah aturan hukum. Hal ini manusia bukan semata-mata objek menjalankan aturan hukum tetapi juga merupakan subjek dalam menjalankan aturan hukum. Di sinilah arti penting dari pendidikan sebagai upaya untuk menentukan kualitas sumber daya manusia, sebagai persyaratan utama dalam menjalankan aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Suatu bangsa akan berhasil dalam menjalankan suatu produk hukum secara *self propelling* dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila telah berhasil meningkatkan jumlah dan mutu dalam pendidikan penduduknya.

Penduduk di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko merupakan masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Tidak sedikit dari penduduknya sudah menamatkan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga Strata Satu (SI).

Mengenai tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko dapat dilihat pada Tabel II. 3 berikut:

TABEL II. 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kelurahan Bagan Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Buta huruf	0	0	0	0 %
2.	Belum sekolah	297	155	452	5,70
3.	Tamat SD	962	692	1.654	21,40
4.	Tamat SLTP	1.230	910	2.140	26,70
5.	Tamat SLTA	1.255	912	2.167	27,10
6.	Tamat PT	937	615	1.552	19,10
	Jumlah	4.681	3.284	7.695	100

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan Tabel II. 3 di atas, dapat diketahui penduduk di Kelurahan Bagan Timur yang belum sekolah sebanyak 951 orang atau (5,57 %), tamat SD sebanyak 1.654 orang atau (21,40 %), tamat SLTP sebanyak 2.140 orang atau (26,70 %), tamat SLTA sebanyak 2.167 orang atau (27,10 %), dan yang tamat PT sebanyak 1.552 atau (19,10 %).

2. Keagamaan

Agama yang dianut penduduk Kelurahan Bagan Timur cukup beragam, tetapi agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut penduduk di Kelurahan Bagan Timur, menyusul agama Kristen dan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 4 berikut:

TABEL II. 4**Agama yang dianut Penduduk di Kelurahan Bagan Timur**

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	6.497	84,56
2.	Kristen	826	8,38
3.	Budha	642	7,06
	Jumlah	7.695	100

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut penduduk di Kelurahan Bagan Timur, dengan jumlah 6.497 orang atau (84,56 %) %, agama Kristen sebanyak 826 orang atau (10,37 %), dan agama Budha sebanyak 642 orang atau (8,06 %).

Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, penduduk yang beragama Islam di Kelurahan Bagan Timur melaksanakannya di rumah ibadah seperti masjid, mushalla, dan ada pula yang melaksanakannya di rumah masing-masing. Jumlah masjid yang ada di Kelurahan Bagan Timur berjumlah 4 unit dan mushalla 26 unit, dan madrasah suluk 18 unit, sedangkan rumah ibadah agama Budha (kelenteng) sebanyak 1 unit dan gereja 1 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel II. 5 di bawah ini:

TABEL II. 5**Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Bagan Timur**

No.	Rumah Ibadah	Jumlah	Persentase
1.	Masjid	4 unit	8 %
2.	Mushalla	26 unit	52 %
3.	Madrasah suluk	18 unit	36 %
4.	Kelenteng	1 unit	2 %
5.	Gereja	1 unit	2 %
	Jumlah	50 unit	100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan Tabel II. 5 di atas, menunjukkan bahwa masjid di Kelurahan Bagan Timur berjumlah 4 unit atau 8 %. Masjid tersebut selain dipergunakan oleh masarakat tempatan untuk tempat beribadah shalat juga dipergunakan untuk tempat bermusyawarah. Mushalla dipergunakan oleh masyarakat selain tempat ibadah shalat juga digunakan tempat mengaji lqroq dan Al-Qur'an. Madrasah Suluk dipergunakan oleh masyarakat tempat shalat berjamaah, menjalankan ilmu tarekat dan sebagai tempat mengajarkan ilmu agama seperti Al-Quran, Hadits, tauhid, fiqih, tafsir, dan lain-lain.

C. Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Penduduk di Kelurahan Bagan Timur merupakan masyarakat perkotaan yang dapat dikatakan sudah mulai maju. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup, peralatan yang dipergunakan sehari-hari serta pola pemikiran mulai maju. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Bagan Timur berjalan dengan tentram dan damai, meskipun terdapat beragam suku namun tidak pernah terjadi

pertikaian di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial diantara mereka sangat baik.

Sedangkan dalam bidang perekonomian masyarakat di Kelurahan Bagan Timur masih tergolong maju, artinya dalam tingkat ekonomi mereka tingkat menengah ke atas dalam pencariannya. Adapun mayoritas masyarakat hidup dari hasil petani dan nelayan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 6 sebagai berikut :

TABEL II. 6

Mata Pencarian Utama Penduduk di Kelurahan Bagan Timur

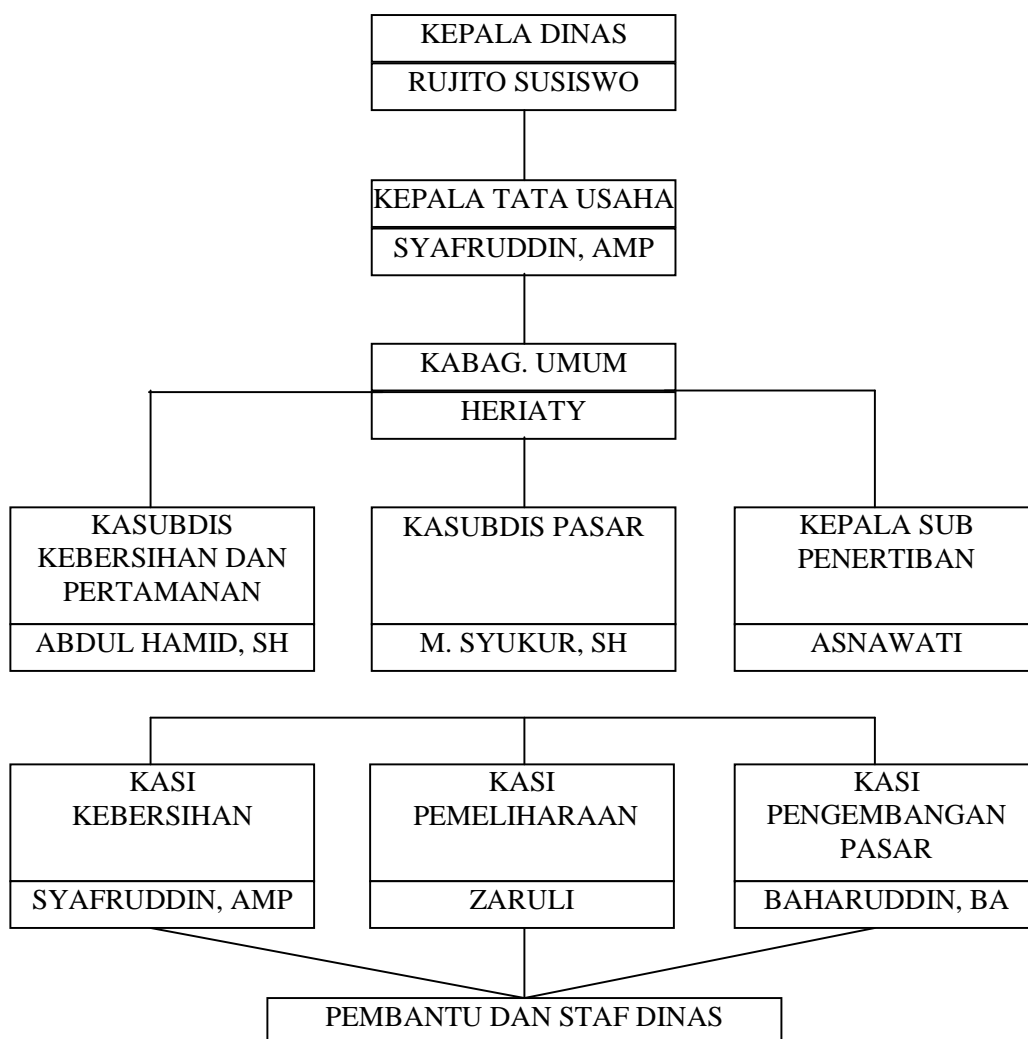
No.	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Petani dan Nelayan	4.300 orang	75,81 %
2.	Pedagang	43 orang	0,75 %
3.	Guru	57 orang	1,00 %
4.	Buruh/karyawan	1.124 orang	19,80 %
5.	Peternak	83 orang	1,46 %
6.	PNS	67 orang	1,18 %
	Jumlah	5.674 orang	100 %

Sumber data : Kantor Lurah Bagan Timur, tahun 2008.

Berdasarkan tabel II. 6 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang bermata pencarian sebagai petani/nelayan berjumlah 4.300 orang atau (75,81 %), sebagai pedagang berjumlah 43 orang atau (0,75 %), sebagai guru berjumlah 57 orang atau (1,00 %) sebagai buruh/karyawan berjumlah 1.124 orang atau (19,80 %), sebagai peternak berjumlah 83 orang atau (1,46 %) dan sebagai PNS sebanyak 67 orang atau 1,18 %). Dengan demikian mayoritas penduduk di kelurahan ini adalah bermata pencarian sebagai petani dan nelayan.

D. Susunan Struktur Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Adapun struktur Dinas Pasar, Kebersihan dan Perlindungan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :



Keterangan:

1. Kepala Dinas : Rujito Susiswo
2. Kepala Bagian Tata Usaha : Syafruddin, Amp
3. Kepala Bagian Umum : Heriaty
4. Kasubdis Kebersihan dan Pertamanan: Abdul Hamid, SH
5. Kepala Sub Dinas Pasar : M. Syukur R, SH
6. Kepala Pengembangan Pasar : Baharuddin, BA
7. Kepala Seksi Kebersihan : Iwan Kurnia, SE
8. Kepala Sub Pemeliharaan : Zaruli
9. Kepala Ketertiban : Asnawati

Sedangkan Pembantu atau staf bagian di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat
1.	Errie, SH	Plt. Kasubdin Retribusi
2.	Neneng Farida, S. Sos	Plt. Kasubag .Kepegawaian
3.	M. Yani, SH	Plt Penyuluhan
4.	Suhartono	Staf Sub. Dinas Pasar
5.	Juli Destino	Staf Sub. Bagian Umum
6.	Jasman	Staf Sub. Bagian Keuangan
7.	Yahya Khan	Staf Sub. Bagian Keuangan
8.	Murliza Sista	Staf Sub. Bagian Keuangan
9.	Sulaiman	Staf Sub. Retribusi

Struktur dan jumlah kepegawaian di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir, masih kekurangan pegawai, yang mana di dinas tersebut masih adanya Pelaksana Tugas (Plt), sehingga pelaksanaan tugas tersebut tidak berjalan secara efektif. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan perannya bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari kepala daerah di bidang pasar kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir juga berfungsi melaksanakan kebersihan dan mengumpulkan sampah, mengumpulkan retribusi, mengatur/menertibkan parkir, dan pengembangan pasar.

Kantor Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir merupakan sarana tempat dan sentral pelaksana tugas umum pemerintah dibidang pasar kebersihan dan pertamanan. Khususnya untuk tingkat Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kabupaten baru, sebagai akibat pemekaran Kabupaten Bengkalis, mengemban tugas yang sangat berat, di samping tugas yang sangat banyak, disertai pula dengan kekurangan tenaga kerja.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Kantor Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir dibantu Kepala Tata Usaha, Kepala Bagian Umum, dan mempunyai enam sub atau seksi yang membantu jalannya pelaksanaan tugas di Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, serta ditambah 9 orang untuk memudahkan pelaksanaan kebersihan di daerah-daerah.¹

¹ Laporan Tahunan Kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2008.

BAB III

PERDA No. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

A. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Retribusi merupakan kontraprestasi yang dibayarkan individu atau kelompok karena menggunakan fasilitas publik. Salah satu contoh objek retribusi adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar atau jalan tertentu sebagai lokasi berdagang serta menggunakan kios atau toko-toko pasar milik pemerintah, atau contoh lainnya. Merujuk pada definisi yang ada, retribusi adalah imbalan uang atas jasa pemerintah yang merupakan kepentingan perorangan pribadi atau badan-badan hukum.

Retribusi di kelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu Retribusi Jasa Umum dimana orang yang dikenai retribusi punya keuntungan langsung, Retribusi Jasa Usaha dimana jasa ini bersifat komersial dan dapat diadakan oleh sektor swasta, dan retribusi Jasa Perizinan Tertentu yang merupakan kepentingan umum dimana pemerintah mengendalikan jumlah dan kualitas dari kegiatan tertentu atau barang dengan penerbitan perizinan.

Didalam PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dengan tegas-tegas disebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di PP ini juga dijelaskan pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Objek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur Pasal 2 PP itu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa retribusi sampah yang diperlakukan Pemda Rohil termasuk Retribusi Jasa Umum.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis/volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan. Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian Keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

B. Sejarah Perda No. 3 Tahun 2007

Seperti telah diketahui bahwa sebelum ditetapkan menjadi Perda, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tersebut telah diterima dengan baik dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (DPRD Kab. Rohil) pada tanggal 20 Juni 2007. Walaupun demikian

Perda tersebut belum dapat dijalankan dengan efektif sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaannya secara teknis. Ibarat sebagai mobil, walaupun sudah lengkap peralatannya, namun belum dapat dijalankan di jalan umum sebelum dilengkapi dengan surat-surat dan syarat-syarat.

Mengingat sampah di Kabupaten Rokan Hilir sangat banyak, begitu juga pengangkutan sampah ke TPA terakhir tidak teratur, membuat masyarakat telah lama menantikan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dapat berlaku efektif.

Seperti diketahui sebelum Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengacu / berpedoman kepada Perda Kabupaten Bengkalis yang merupakan Induk dari Kabupaten Rokan Hilir. Mengingat Perda Kabupaten Bengkalis tidak sesuai lagi dengan Kabupaten Rokan Hilir yang begitu luas dan dipenuhi penduduk serta memiliki pasar-pasar tradisional yang memadati kota. Maka dengan berpisahnya Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis selama lebih kurang 7 tahun, maka sewajarnya Kabupaten Rokan Hilir memiliki Perda sendiri yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan. Mengingat penduduk Kabupaten Rokan Hilir cukup banyak tentu banyak menghasilkan sampah setiap harinya, maka dengan memiliki Perda sendiri maka secara hukum mempunyai landasan yang kuat untuk menangani masalah sampah.¹

Semenjak Perda ini diundangkan dan dijalankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil memperoleh penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 4 Januari 2006 dan 17 Januari 2007, dan juga pada tanggal 9 Juni 2008 Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan Penghargaan dan Presiden RI melalui Menteri Lingkungan Hidup sebagai kota terbersih.

¹ Sulaiman, Staf Bagian Retribusi, *Wawancara*, Bagan Timur, 6 Mei 2008.

Menurut sejarahnya sebelum Perda No. 3 Tahun 2007 ditetapkan, terlebih dahulu telah mengalami proses selama lebih kurang 16 bulan dibahas dan direvisi oleh kalangan eksekutif maupun legislatif. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 2007 Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan berhasil ditetapkan. Perda No. 3 Tahun 2007, terdiri dari 31 pasal dan terdiri dari 23 bab sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum;
- II. Nama Objek dan Subyek Retribusi;
- III. Golongan Retribusi;
- IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- V. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif ;
- VI. Struktur Besarnya Tarif;
- VII. Wilayah Pemungutan;
- VIII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
- IX. Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Retribusi;
- X. Tata Cara Pembayaran;
- XI. Tata Cara Penagihan;
- XII. Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- XIII. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan;
- XIV. Tata Cara Penyelesaian Keberatan;
- XV. Tata cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- XVI. Kadarluarsa;
- XVII. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadarluarsa

- XVIII. Pengelolaan;
- XIX. Instansi Pemungutan;
- XX. Pembinaan dan Pengawasan;
- XXI. Ketentuan Pidana;
- XXII. Penyidikan;
- XXIII. Penyidikan/Penutup.

Berikut akan dikemukakan bagian-bagian yang terpenting dari isi Perda No 3 tahun 2007 antara lain :

I. Golongan retribusi

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

II. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi berdasarkan untuk keperluan biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dengan tetap berpegang pada aspek keadilan.

III. Struktur Besar Tarif

Tempat usaha:

- a. Untuk tempat usaha type U1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan;
- b. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
- c. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- d. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbulan;

- e. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- 2. Tempat umum:
 - a. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
 - b. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- 3. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
 - b. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
 - c. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorong di tempat yang diizinkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari.

IV. Tata cara Pemunggutan dan Penetapan retribusi

- 1. Pemunggutan retribusi tidak boleh diborongkan
- 2. Retribusi dipunggut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas, disediakan oleh Dinas Pendapatan daerah.
- 4. Hasil penggutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam besarnya tarif peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah.

V. Tata Cara Pembayaran

Pasal 13 :

1. Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan karcis.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14 :

1. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

Pasal 15 :

1. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
2. Pembayaran atas retribusi yang ditetapkan diberikan tanda bukti pembayaran.
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

VI. Tata Cara Penagihan

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan, dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan. Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

VII. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Proses perkembangan pembahasan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan menjadi Perda yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2007, proses pembahasan mengalami saat-saat yang rumit sebagai titik puncak dari ungkapan dan pandangan akhir dikalangan fraksi-fraksi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir ketika mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan Perda tersebut.

Melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan, secara efektif dalam substansinya harus berisi aturan menyangkut masalah tata cara pemungutan dan penetapan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara perhitungan pengembalian pembayaran retribusi.

Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah pembayaran (retribusi) yang banyak berhubungan dengan masyarakat, diharapkan akan dapat memperlancar dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Berikut akan dikemukakan struktur besarnya tarif dalam isi Perda No 3 tahun 2007 antara lain :

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

a. Rumah tinggal :

1. Untuk rumah tinggal Type R1 sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) perbulan
2. Untuk rumah tinggal Type R2 sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratusa rupiah) perbulan

b. Tempat usaha:

1. Untuk tempat usaha type U1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan;
2. Untuk tempat usaha type U2 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
3. Untuk tempat usaha type U3 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
4. Untuk tempat usaha type U4 sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perbulan;
5. Untuk tempat usaha type U5 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.

c. Tempat umum:

1. Untuk tempat umum type TU1 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbulan;
2. Untuk tempat umum type TU2 sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Untuk tempat umum type TU3 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

d. Untuk kendaraan angkutan penumpang yang masuk terminal bus dan terminal non bus sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) perhari.

e. Untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Untuk pedagang pasar di los pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
 2. Untuk pedagang pasar di kios pasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari;
 3. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorong di tempat yang diizinkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) perhari.
- f. Untuk pedagang kaki lima dan gerobak dorong ditempat yang diizinkan Rp. 1.000 (seribu rupiah) perhari.
- . Untuk melaksanakan Perda ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai badan dan instansi pemerintahan khususnya dari Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, sehingga sesuatu dapat terlaksana dengan lancar.²

C. Prinsip Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka telah ditetapkan pula Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah oleh UU No. 34 Tahun 2002, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001. Terdapat beberapa prinsip demi menjamin dalam melaksanakan nilai-nilai retribusi dalam praktek. Berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan agar pelaksanaan retribusi di daerah efektif dan lebih sempurna. Oleh karena itu bukannya tidak adanya berbagai pembaharuan atau perubahan dalam pelaksanaan hukum. Dengan ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai suatu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada

² Jafrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *wawancara*, 7 Mei 2008.

masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memandai, supaya peningkatan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan kinerja pemunggutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.³

Adapun prinsip-prinsip Perda No. 3 Tahun 2007 secara umum yaitu : dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan untuk keperluan biaya penyelenggara pelayanan persampahan dan kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dengan tetap berpegang pada aspek keadilan.⁴

Sesuai dengan landasan falsafah dan UUD 1945, maka Perda ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Perda No. 3 Tahun 2007 telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan besarnya tarif.

Perda ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan besarnya tarif retribusi yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

D. Kebersihan Lingkungan Dalam Islam

Membangun konsep kebersihan, Islam menetapkan berbagai macam peristilahan tentang kebersihan. Umpamanya : *tazkiyah*, *thaharah*, *nazhafah*, dan *fitrah*, seperti dalam hadist yang memerintahkan khitan, sementara dalam membangun perilaku bersih ada istilah ikhlas, *thib al-*

³Edisi khusus, *PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, (Jakarta : CV. Tamita Utama, 2002), h. 173.

⁴.Perda No. 3 tahun 2007, bab V, pasal 7, hal. 6

nafs, ketulusan kalbu, bersih dari dosa, tobat, dan lain-lain sehingga makna bersih amat holistik karena menyangkut berhagai persoalan kehidupan, baik dunia dan akhirat.⁵

Konsep yang diajarkan dalam Islam dalam memelihara lingkungan adalah dengan memperhatikan masalah kebersihan. Dan pada hakekatnya pandangan Islam terhadap kebersihan merupakan sebuah prinsip yang tidak disangkal dalam agama-agama lain, karena kebersihan adalah ibadah bahkan merupakan sebagian dari iman. Biasanya, yang pertama kali dibahas dalam Islam adalah bab bersuci (*thaharah*). Itu karena kebersihan memang merupakan kunci ibadah sehari-hari. Misalnya untuk melaksanakan shalat, sebagaimana shalat itu sendiri merupakan tiang agama, dan tidak akan sah shalat seorang muslim kecuali setelah suci dari hadas lahir maupun bathin. Hadas pada lahir masih mudah untuk dibersihkan, seperti hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudhu, begitu juga dengan hadas besar pada lahir bisa dihilangkan dengan mandi. Tetapi hadas yang ada pada bathin jauh lebih sulit untuk dibersihkan atau dihilangkan, seperti seperti sifat binatang, ketamakan, sombong, riya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu syarat sahnya shalat adalah kebersihan lahir dan bathin yang menjadi pakaiannya manusia, dalam hal ini Allah berfirman: ⁶

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya : “Dan pakaianmu bersihkanlah”.

Hal ini juga telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadits tentang perlunya kebersihan baik lahir maupun bathin :⁷

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ جُنُودًا يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama...Op.Cit.*, h. 105.

⁶ Q.S. Al-Muddatstsir : 4.

⁷ Q.S. At-Taubah : 108.

Artinya : “Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih”.

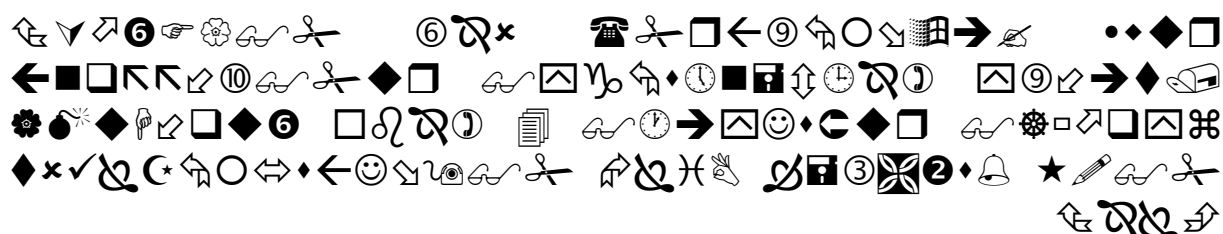
Maka apabila kita renungkan secara mendalam, tidak diragukan lagi bahwa pemeliharaan kebersihan lingkungan, pelestarian dan pengembangannya, tercakup dalam katagori empat masalahat pokok diatas :

1. Menjaga Kebersihan lingkungan Sama Dengan Menjaga Agama⁸

Segala usaha pemeliharaan kebersihan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga Agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk dalam katagori yang sangat mendasar. Karena memang, perbuatan dosa yang dapat mencemari kebersihan lingkungan akan menodai substansi dari keberagaman yang benar. Dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini. Sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama.

Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat menjadi khalifah karena kekuasaan Allah diatas bumi milik-Nya. Tidak sepatutnyalah mereka bertindak seakan-akan mereka adalah raja diraja yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah dikerjakan.

Selain itu, penyelewengan terhadap kebersihan lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah SWT, untuk membagun bumi, memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya. Tentang hal ini Allah berfirman :



⁸. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.* h. 64-65

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dkabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-A’raf :56)⁹

2. Menjaga Kebersihan Lingkungan Sama Dengan Menjaga Keturunan¹⁰

Menjaga kebersihan lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia di atas bumi ini. Maka menjaga keturunaan mempunyai arti, menjaga keberlangsungan generasi masa depan.

Perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan. Karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan. Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tapi pada sisi lain, bahayanya akan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Bila itu terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.

Upaya menjaga kesinambungan generasi ini telah ada dalam dasar-dasar islam, yang tercemin dalam bentuk solidaritas generasi muslim antara yang satu dengan yang lain. Ini semua sebagai aplikasi nyata dari upaya menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak generasi yang akan datang. Aksi eksploitasi tersebut jelas merupakan bentuk kezaliman yang dilarang Allah SWT.¹¹ Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

⁹ . Q.S. Al-A’raf : ...

¹⁰ . Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.* h. 69

¹¹ . *Ibid.* h. 70

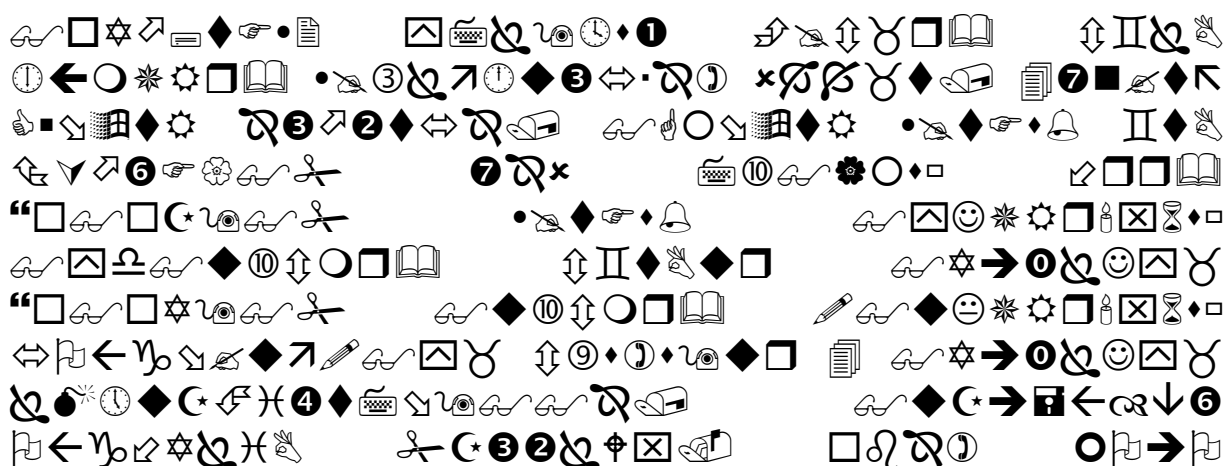
Artinya : “Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain”

3. Menjaga Kebersihan Lingkungan Sama Dengan Menjaga Jiwa¹²

Menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang ke tiga, yaitu menjaga jiwa. Maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka.

Soal ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurusan sumber dayanya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin nampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia

Antusiasme islam sangat besar sekali dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan terhadap jiwa sebagai sebuah dosa besar yang berada dalam urutan kedua sesudah syirik kepada Allah SWT, begitu pentingnya harga sebuah jiwa, sehingga Al-Qur'an sendiri menegaskan,



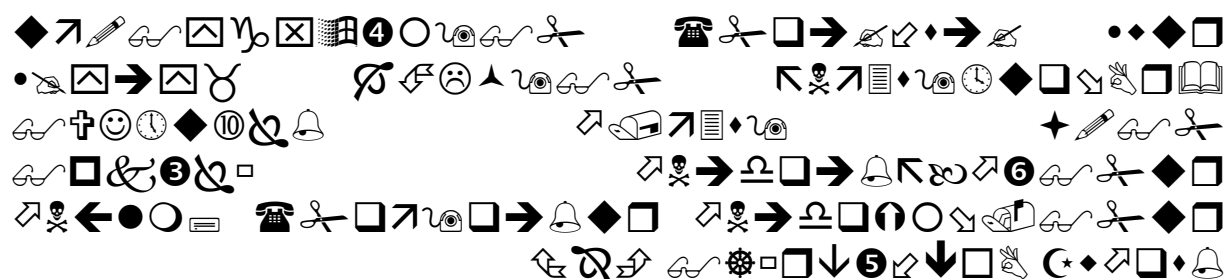
¹². Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.* h. 64-66



Artinya : “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya’ (Al-Maidah :32)¹³

4. Menjaga Kebersihan Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta¹⁴

Menjaga kebersihan lingkungan sama pula dengan kebutuhan pokok yang keempat, yaitu menjaga harta. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia diatas bumi ini. Seperti yang telah disinyalis Allah dalam firman-Nya :



Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (An-Nisa ;5)¹⁵

Harta itu bukan hanya uang, emas dan permata saja, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia, dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk

¹³. Q.S. Al-Maidah : 32

¹⁴. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.* h. 66-67

¹⁵. Q.S. An-Nisa : 5

harta. Maka bumi adalah harta, pohon adalah harta, tanaman itu harta, binatang ternak itu harta, air itu harta, gembalaan itu harta, tempat-tempat tinggal juga harta, pakaian itu harta, perangkat-perangkat rumah juga harta, tambang juga harta, dan minyak juga harta.

Jadi, keharusan menjaga kebersihan lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen diatas adalah dengan menjaga sumber dayanya dan jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas. Ataupun terjebak dalam kesalahan mengenai pola penumbuhan dan pemeliharannya, sehingga akan menyebabkan kerusakan, ataupun menggunakannya dengan sewenang-wenang yang berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan.

Agama dan ajaran Islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan, baik lahiriah fisik maupun batiniyah. Kebersihan lahiriyah itu tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan batiniyah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah tertentu harus membersihkan terlebih dahulu aspek batiniah diikuti dengan aspek lahiriyahnya. Ajaran Islam yang memiliki aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak ada kaitan dengan seluruh kebersihan ini. Hal ini terdapat dalam tata cara ibadah secara keseluruhan. Orang yang mau shalat misalnya, diwajibkan membersihkan fisik dan psikhisnya oleh karena itu manusia harus suci dari *fahsyah* dan *munkurat*.¹⁶

Persoalannya ialah bagaimana kebersihan dalam Islam dan apa konsep Islam mengkonsepsi kebersihan. Persoalan ini diajukan karena ketika Islam memiliki ajaran kebersihan yang amat lengkap, ternyata dalam aspek perilaku masyarakat muslim belum sebagaimana yang

¹⁶ Nogarsyah Moede, *Bagaimana Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam*, (Bandung : Marjan Bandung, 1993), h. 39.

dikehendaki ajaran Islam itu sendiri. Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek kebersihan dan belum sadar kebersihan yang menjadi bagian ajarannya.

BAB IV

PELAKSANAAN PERDA NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bagan Timur Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007

Partisipasi bukan hanya bagian penting tapi juga vital dalam menjalankan sebuah aturan hukum. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta setiap individu maupun kelompok dalam badan usaha untuk menanggulangi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban sesuai kemampuannya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan pemerintah.

Pasal 4 ayat a UU No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa pembangunan dan pengembangan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Di sini masyarakat merupakan subjek, peran yang fundamental dan pemegang kendali pengawasan terhadap pemerintah.

Tetapi dalam pengawasan tersebut selain dapat melakukan pengawasan secara langsung, masyarakat juga dapat mendelegasikan wewenangnya kepada badan pengawas. Selain itu, dijelaskan juga bahwa partisipasi masyarakat harus terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari, misalnya mengumpulkan barang-barang bekas untuk dibuang tempat pembuangan akhir dan bertransaksi membayar retribusi kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pembayaran retribusi kebersihan. Partisipasi masyarakat juga harus direalisasikan melalui berbagai cara antara lain:

1. Menerima dan melaksanakan Perda yang sudah menjadi keputusan Pemerintah;
2. Mengawasi pengurus/pemerintah dan pengelola secara dinamis;

3. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan;
4. Membantu pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing;
5. Membayar retribusi yang sudah menjadi kewajibannya;
6. Memberikan masukan-masukan atau pendapat dan kritik terhadap pelaksanaan pengurus/pemerintah;
7. Melakukan transaksi dan aktif dalam kegiatan proses partisipasi sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok, berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing.

Adapun untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, penulis telah menyebarkan angket kepada 50 responden. Untuk melihat partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur ikut membantu membersihkan sampah sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007, dapat dilihat pada Tabel IV. 1 berikut:

TABEL IV. 1

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bagan Timur Ikut Membantu Membersihkan Sampah Sesuai Kemampuannya Masing-Masing, Membuang Sampah pada Waktu dan Tempat yang Sudah disediakan dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	12	24 %
2.	Kurang	15	30 %
3.	Tidak baik	23	46 %

	Jumlah	50	100 %
--	--------	----	-------

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 1 di atas, menunjukkan mayoritas tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur ikut membantu membersihkan sampah sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 adalah "tidak baik", sebagaimana dijawab oleh responden sebanyak 46 %. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dapat dikatakan masih rendah, melihat dari jawaban responden yang menjawab "tidak baik" sebanyak 46 % atau paling tinggi dari seluruh jawaban responden lainnya.. Sedangkan sebagian kecil saja yang menjawab "kurang baik" dan baik yakni sebanyak 15 % dan 30 %.

Hal ini didukung oleh keterangan responden yang penulis wawancarai yang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Bagan Timur ikut membantu membersihkan sampah sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 masih rendah.¹

Jawaban serupa juga diberikan oleh responden lainnya yang penulis wawancarai, yang mengatakan bahwa "masyarakat di daerah ini kurang baik partisipasinya terhadap Perda No. Tahun 2007, antara lain seperti membayar retribusi, gotong-royong, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dan lain sebagainya. Namun Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir masih terus berupaya mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat, agar ini dapat lebih maksimal dapat dijalankan."²

¹ Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 6 Mei 2008.

² Suhartono, Staf Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 8 Mei 2008.

Sebagaimana diketahui di Kelurahan Bagan Timur, bahwa persyaratan untuk berdagang di toko/kios atau berjualan di pasar ialah membayar uang sewa toko/kios dan membayar retribusi kebersihan wajib tiap bulannya kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir.

Pembayaran retribusi kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pedagang kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang program kebersihan di Kab. Rokan Hilir. Jika pembayaran retribusi oleh masyarakat sedikit atau kurang maka setidaknya program pemerintah dibidang kebersihan akan terhambat.³ Selanjutnya, untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam pembayaran retribusi kebersihan dapat dilihat pada Tabel IV.2 berikut:

TABEL IV. 2

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bagan Timur
dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan**

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	7	14 %
2.	Kurang baik	18	36 %
3.	Tidak baik	25	50 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 2 di atas, mayoritas tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam pembayaran retribusi kebersihan menjawab ”tidak baik”. Hal ini sesuai dengan jawaban responden sebanyak 50 %. Responden yang menjawab

³ Jasman, Staf Keuangan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 8 Mei 2008.

”kurang baik” sebanyak 36 %, menurut responden yang menjawab ”kurang baik” ini bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan hanya ketika diminta oleh petugas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. Sedangkan yang menyatakan ”baik” hanya sebanyak 14 %, menurut responden ini partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan sudah merupakan tanggung jawab masyarakat untuk sama-sama mendukung program kebersihan.

Jawaban responden mayoritas responden di atas, juga sesuai dengan keterangan responden yang penulis wawancarai, ia mengatakan partisipasi masyarakat di daerah ini khususnya di Kelurahan Bagan Timur masih kurang, mereka tidak tahu kewajibannya.⁴ Dengan demikian dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan masih rendah, karena mayoritas responden penelitian ini telah menjawab ”tidak baik”. Hal tersebut pula dapat dilihat dari pedagang atau masyarakat di Kelurahan Bagan Timur banyak yang enggan/berat untuk membayar retribusi kebersihan kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran retribusi kebersihan yang dilakukan oleh masyarakat/pedagang kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Kabupaten Rokan Hilir belum dapat diandalkan Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program dibidang kebersihan.

Untuk melakukan pembayaran retribusi, masyarakat sebenarnya wajib membayar sesuai tarif retribusi kebersihan yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2007. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir telah memberikan pelayanan kebersihan seperti memungut dan mengangkut sampah masyarakat dari tempat penampungan sampah, pelaksanaan kebersihan fasilitas-fasilitas umum, penanaman dan perawatan taman oleh petugas kebersihan yang digaji oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir.

⁴ Sulaiman, Staf Sub Retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 13 Mei 2008.

Selanjutnya untuk mengetahui pendapat masyarakat atau pedagang terhadap tarif retribusi kebersihan yang dibayar kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, dapat dilihat pada Tabel IV. 3 berikut:

TABEL IV. 3

Tanggapan Responden Terhadap Tarif Retribusi Kebersihan yang dibayar Kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak memberatkan	9	18 %
2.	Tidak tahu	14	28 %
3.	Memberatkan	27	54 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 3 di atas, menunjukkan mayoritas tanggapan responden terhadap tarif retribusi kebersihan yang dibayar kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah "memberatkan". Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menjawab "memberatkan" sebanyak 54 %, menurut responden ini tarif yang sudah ditetapkan di dalam Perda No. 3 Tahun 2007 sangat memberatkan, sebab pendapatan masyarakat tidak seimbang untuk membayar bermacam-macam pengeluaran. Responden yang menjawab "tidak tahu" sejumlah 28 %. Responden yang menjawab "tidak memberatkan" sebanyak 18 %. Menurut responden ini besarnya tarif kebersihan yang telah ditetapkan tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat.

Meskipun demikian mayoritas tanggapan pedagang atau masyarakat terhadap tarif retribusi kebersihan yang dibayar kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar,

Kebersihan dan Pertamanan adalah "memberatkan". Keadaan ini sesuai dengan jawaban Ibu Silel, yang penulis wawancarai dengan mengatakan bahwa masyarakat atau pedagang di Kelurahan Bagan Timur banyak yang enggan membayar tarif retribusi kebersihan dan keberatan dengan tarif yang sudah ditetapkan.⁵ Kemudian Bapak Udin, menurutnya tarif retribusi kebersihan cukup tinggi⁶

Berbeda dengan jawaban di atas, Darsono mengatakan tarif yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir sudah pas dengan kondisi riil dan tidak memberatkan masyarakat. Sekarang kita lihat di masyarakat sudah sangat banyak yang mau membayar retribusi sesuai tarif ketentuan Perda No. 3 Tahun 2007. Masyarakat tidak keberatan, kalau ada masyarakat kurang setuju atau keberatan itu karena masyarakat tidak mengerti, tapi kita minta kepada masyarakat kesadarannya untuk partisipasi terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tersebut.⁷

Jawaban Darsono di atas, juga sesuai dengan jawaban Sulaiman, yang mengatakan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dalam menetapkan tarif retribusi sama sekali tidak memberatkan masyarakat.

Partisipasi terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, ditandai dengan hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya, karena kebutuhan masyarakat maupun lingkungan usaha di pasar selalu berubah, maka pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan harus terus menerus disesuaikan. Untuk mewujudkan pelayanan tersebut Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan harus mampu (memiliki kemampuan/kompetensi) dan memiliki motivasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan pelayanan terhadap masyarakat.

⁵ Ibu Silel, Pedagang Kain, *Wawancara*, Bagan Timur, 6 Mei 2008.

⁶ Udin, Pedagang Kain, *Wawancara*, Bagan Timur, 6 Mei 2008.

⁷ Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 7 Mei 2008.

Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan harus selalu meningkatkan pelayanannya, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai *stake holder*. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan baik dalam segi memberi maupun menerima. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan bisa berupa pembentukan tim atau posko untuk pengaduan sekaligus tempat pembayaran retribusi, atau bila perlu turun langsung (bertatap muka) ke masyarakat untuk pengambilan pembayaran retribusi serta sekaligus menerima menampung aspirasi. Sehingga dengan berjalannya pelayanan seperti ini, maka jumlah masyarakat maupun jumlah pembayaran retribusi masyarakat dapat lebih ditingkatkan.⁸

Selanjutnya, untuk mengetahui tentang pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat atau pedagang di Kelurahan Bagan Timur dapat di lihat pada Tabel IV. 4 berikut :

TABEL IV. 4

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan yang diberikan
Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan**

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	6	12 %
2.	Kurang baik	14	28 %
3.	Tidak baik	30	60 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 4 di atas, menunjukkan mayoritas tanggapan pedagang atau masyarakat dalam pelayanan yang diberikan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah

⁸ Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 6 Mei 2008.

”tidak baik”, karena ada 60 % responden yang menjawab ”tidak baik”. Menurut responden ini, Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam memberikan pelayanan belum menyediakan tempat atau ruangan khusus tempat pembayaran retribusi kebersihan. Responden yang menjawab ”kurang baik” ada sebanyak 28 %, menurut responden ini ruangan yang disediakan terlalu kecil, dan yang menjawab ”baik” hanya sebanyak 12 % karena menurut responden ini tempat pembayaran retribusi maupun pegawai yang melayani telah sesuai dengan tuntutan dalam pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi informatif, ramah, dan cepat.

Meskipun demikian, mayoritas tanggapan pedagang atau masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan ”tidak baik”, karena ada 60 % responden yang menjawab ”tidak baik”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang responden, yang berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pedagang tidak baik dan belum memuaskan. Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum mempermudah dalam pelayanan, sarana pelayanan yang disediakan belum cukup dan minim.⁹

Namun pernyataan yang berbeda diberikan oleh staf Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa ”pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sudah

⁹ Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 7 Mei 2008.

baik”. Kami selalu berupaya agar hal ini terus ditingkatkan demi kenyamanan masyarakat dalam berurusan.¹⁰

Berlawanan dengan hasil wawancara di atas, melalui wawancara dengan responden lainnya, mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum baik.¹¹ Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum baik.

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah dinas harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apabila pelayanan dari Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dinas tersebut. Di samping memberikan pelayanan, Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir juga harus mengadakan pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat atau pedagang, karena kebanyakan masyarakat bersifat pasif. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan mereka terhadap Perda No. 3 Tahun 2007. Secara bertahap mereka harus meningkatkan pengetahuan terhadap Perda tersebut melalui penyuluhan. Penyuluhan ini dapat diberikan melalui kegiatan pembinaan/penyuluhan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Berikut tanggapan responden (masyarakat/pedagang) tentang pembinaan atau penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV. 5 berikut:

¹⁰ Sulaiman, Staf Sub Retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 13 Mei 2008.

¹¹ Upik, Pedagang Kain, *Wawancara*, Bagan Timur, 10 Mei 2008.

TABEL IV. 5

**Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan atau
Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir**

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	9	18 %
2.	Tidak tahu	12	24 %
3.	Tidak Baik	29	58 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 5 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas tanggapan masyarakat terhadap pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan "tidak baik", yakni sebanyak 58 %. Menurut mayoritas responden ini pemerintah daerah Kab. Rokan Hilir belum memberikan pembinaan atau penyuluhan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui Perda No. 3 Tahun 2007. Responden yang menjawab "tidak tahu" sebanyak 24%, responden ini tidak tahu ada atau tidaknya pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir. Responden yang menjawab "baik" hanya sebanyak 18 %. Menurut responden ini pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir telah dilaksanakan melalui aparat kelurahan bersama-sama dengan lembaga di kelurahan serta RW, RT setempat..

Namun, mayoritas tanggapan masyarakat terhadap pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan "tidak baik". Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang responden. Responden ini mengatakan bahwa "pembinaan atau

penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir kepada masyarakat selama ini masih kurang. Penyuluhan ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi tentang isi perda tersebut”.¹²

Sejalan dengan jawaban responden lainnya, mengatakan bahwa ”pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir belum maksimal.¹³ Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan belum maksimal melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pedagang.

Di samping itu, memberikan pembinaan atau penyuluhan, masyarakat juga harus memberikan kritik, atau saran termasuk keluhan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban masyarakat atau pedagang terhadap keluhan, kritikan dan usulan kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada Tabel IV. 6 berikut:

TABEL IV. 6

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam memberikan Keluhan, Kritikan dan Usulan Kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Melaui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Perlu	6	12 %
2.	Tidak tahu	13	26 %
3.	Tidak perlu	31	62 %
	Jumlah	50	100 %

¹² Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 10 Mei 2008.

¹³ Amer, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Bagan Timur, 11 Mei 2008.

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 6 di atas, menunjukkan mayoritas tanggapan masyarakat terhadap keluhan, kritikan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah “tidak perlu”, yakni sebanyak 63 %. Menurut responden ini keluhan, kritikan dan usulan tidak perlu disampaikan, sebab walaupun dilakukan, lebih banyak tidak dilaksanakan dari pada dilaksanakan. Responden yang menjawab “tidak tahu” sebanyak 26 %. Sedangkan yang menyatakan ”perlu” sebanyak 12 %, menurut responden ini, keluhan kritikan, dan usulan setidaknya cepat atau lambat akan ditanggapi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun demikian, mayoritas tanggapan masyarakat terhadap menyampaikan keluhan, kritikan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) adalah “tidak perlu”, yakni sebanyak 63 %.

Keadaan di atas, sesuai dengan jawaban responden yang diwawancarai, ia mengatakan bahwa ”masyarakat atau pedagang enggan menyampaikan keluhan, kritikan dan usulan kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan khususnya yang berada di Kelurahan Bagan Timur”.¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sulaiman, yang berpendapat bahwa masyarakat atau pedagang khususnya di Kelurahan Bagan Timur selama ini jarang memberikan keluhan, kritikan, dan usulannya kepada Pemerintah Daerah. Padahal dengan cara itu Pemerintah Daerah menjadi tahu akan kekurangannya dalam mengimplementasikan kebijakan maupun program yang sudah berjalan.¹⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam menyampaikan keluhan, kritikan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah

¹⁴ Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 14 Mei 2008.

¹⁵ Jasman, Staf Keuangan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 15 Mei 2008.

Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) selama ini adalah “kurang baik”.

B. Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2007

Sebagaimana diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penunjang untuk mendanai pembangunan di daerah. Meskipun hal ini bukan merupakan suatu jaminan untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan dan kesejahteraan, karena PAD merupakan pelengkap yang harus dicapai dan dipenuhi. Tetapi sebaliknya kekurangan PAD bagi suatu daerah menyebabkan terbatasnya kemampuan gerak dalam berusaha. Sehingga besar kecilnya PAD setidaknya dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun untuk mengetahui PAD di Kabupaten Rokan Hilir dalam lima tahun terakhir dapat lihat pada Tabel IV. 7 berikut:

TABEL IV. 7
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003- 2007

No.	Tahun	Jumlah PAD Rp	Selisih dari tahun sebelumnya Rp
1.	2003	199.520.541,590,	-
2.	2004	298.225.312,114,	98.704.770.524,00
3.	2005	319.690.512,141	21.465.200.027,00
4.	2006	389.255.500,130	69.564.987.989,00
5.	2007	426.339.514,520	37.084.014.390,00

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kab. Rohil, 2008.

Berdasarkan Tabel IV. 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa PAD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2004 meningkat 9,48 % atau Rp 98.704.770.524,00. Pada tahun 2005 PAD yang diperoleh Kabupaten Rokan Hilir berjumlah Rp 319.690.512.141,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 7,20 %. Pada tahun 2006 jumlah PAD Kabupaten Rokan Hilir kembali meningkat sebesar 1,77 % atau Rp 69.564.987.989,00, terakhir pada tahun 2007 jumlah PAD Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 426.339.514.520,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 9,53 %. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkembangan PAD Kabupaten Rokan Hilir setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan ; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber PAD bersifat potensial didasarkan pada penerimaan dari setiap Dinas dan Badan/Kantor se-Kabupaten Rokan Hilir. Penerimaan tersebut dapat besar dan dapat pula kecil, hal ini dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kemampuan Dinas dan Badan/Kantor dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD.

Selain sumber PAD seperti diuraikan di atas, yang juga sebagai sumber pendapatan intern. Daerah dapat pula menambah pendapatannya yang berasal dari sumber ekstern yang berasal dari pinjaman daerah dan dana hibah dari luar daerah, termasuk pula dalam sumber ekstern ini misalnya berbagai fasilitas yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Seperti diuraikan di atas, Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak saja ditujukan untuk memperbesar PAD, tetapi juga untuk meringankan beban Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir yang timbul dari adanya sampah-sampah yang berasal dari kegiatan usaha-usaha masyarakat. Melalui Perda ini Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dan masyarakat bisa bekerja sama untuk mengatasi dan membersihkan sampah-sampah. Supaya mencapai kondisi yang baik guna menjaga keindahan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Meskipun hanya sebagian masyarakat dan juga para pedagang yang ikut berpartisipasi membantu membersihkan sampah sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007. Semestinya bila Perda No. 3 Tahun 2007 dijalankan secara baik dengan penuh tanggung jawab, maka akan meringankan beban Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir untuk mempertahankan prestasi dibidang kebersihan. Sebagaimana yang sudah diraih Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir selama 3 tahun berturut-turut dengan mendapatkan penghargaan Adipura (dari Presiden RI melalui Menteri Lingkungan Hidup) sebagai kota dan kinerja yang terbersih di Riau. Meskipun penghargaan tersebut, lebih dominan merupakan hasil kerja Pemerintah Daerah dan belum menjadi suatu budaya masyarakatnya. Karena untuk melaksanakan program kebersihan, Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir telah menganggarkan dana yang tidak sedikit.¹⁶

Selanjutnya kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat di Kelurahan Bagan Timur pada dasarnya berpotensi menghasilkan pendapatan, karena pembayaran retribusi kebersihan merupakan bagian dari pendapatan asli bagi daerah. Besar kecilnya pendapatan retribusi kebersihan tergantung pada kesadaran masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pendapatan retribusi di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada Tabel IV. 8 berikut:

¹⁶ Errie, Plt Kasudin Retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 7 Mei 2008.

TABEL IV. 8
Perkembangan Retribusi yang diperoleh Dinas Pasar, Kebersihan dan
Pertamanan Kab. Rokan Hilir dari Tahun 2003-2007

No.	Tahun	Jumlah Perolehan Retribusi Rp	Perubahan	Persentase
1.	2003	96.520.000,00	-	-
2.	2004	103.725.000,00	7.205.000,00	7,46 %
3.	2005	109.690.000,00	5.965.000,00	5,75 %
4.	2006	119.255.130,00	9.565.130,00	8,72 %
5.	2007	126.235.500,00	6.980.370,00	5,85 %

Sumber : Kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Kab. Rokan Hilir, 2008.

Berdasarkan Tabel IV. 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan retribusi di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebanyak 7,46 % atau Rp 7.205.000 dari pendapatan retribusi pada tahun 2003 yang berjumlah Rp 96.520.000. Pendapatan retribusi pada tahun 2005 berjumlah Rp 109.690.000 mengalami peningkatan sebanyak 5,75 %. Pendapatan pada tahun 2006 juga mengalami peningkatan sebanyak 8,72 % atau Rp 119.225.130. Terakhir pada tahun 2007 pendapatan retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir kembali mengalami kenaikan sebanyak 5,85 % atau Rp 126.335.000 dari pendapatan tahun 2006. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan Retribusi di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan selalu mengalami peningkatan. Adapun besar kecilnya perkembangan retribusi tersebut tergantung dari pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Perkembangan penerimaan retribusi di atas, maka tidak saja ditujukan untuk memperbesar pendapatan, tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari minimnya pendapatan dari pajak atau di luar sektor retribusi. Melalui pengumpulan retribusi pada kondisi baik dapat menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi (perluasan) pendapatan terhadap pembangunan.

Hasil pendapatan retribusi merupakan suatu keuntungan yang diperoleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, selama lima tahun terakhir ini. Adapun dari pendapatan itu Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir dapat digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pasar serta pembangunan lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Pembayaran retribusi persampahan dan kebersihan kepada Pemerintah Daerah, tujuan utamanya bukanlah semata-mata untuk memperbanyak PAD seperti yang diusahakan dinas-dinas dan badan-badan di daerah. Dengan pendapatan dari retribusi persampahan dan kebersihan dapat digunakan kembali untuk membangun pasar, memperbaiki atau merenovasi pasar, sarana dan fasilitas kebersihan, membuat taman, dan lain sebagainya.¹⁷

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pembangunan daerah dan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir, dapat dilihat pada Tabel IV. 9 berikut:

¹⁷ Melville C Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), h. 26.

TABEL IV. 9

**Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Daerah dan Pasar yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir**

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	12	24 %
2.	Tidak tahu	15	30 %
3.	Belum baik	23	46 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 9 di atas, menunjukkan mayoritas tanggapan responden terhadap pembangunan daerah dan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir adalah “belum baik”, yakni sebanyak 46 %. Menurut responden ini pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir belum merata di samping pembangunan pasar yang telah dibangun tidak ada upaya perawatan. Responden yang mengatakan “tidak tahu” sebanyak 30 % atau 15 orang.. Sedangkan responden yang mengatakan “baik” sebanyak 24 % atau 12 orang, menurut responden ini pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir banyak telah diselesaikan secara baik.

Hasil penyebaran angket di atas, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yang menerangkan bahwa “pembangunan yang ada sekarang belum merata di setiap daerah dan ada juga yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran, dan kami mengharapkan hendaknya masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan”.¹⁸

¹⁸ Darsono, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 12 Mei 2008.

Mencapai dan merealisasikan tujuan tersebut sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintah Daerah untuk menuju masa depan yang cerah. Selanjutnya untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dan pasar, dapat dilihat pada Tabel IV. 10 berikut:

TABEL IV. 10

Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Retribusi Kebersihan Kota dan Pasar

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	13	26 %
2.	Tidak tahu	14	28 %
3.	Kurang baik	23	46 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel IV. 10 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan retribusi kebersihan kota dan pasar, adalah "kurang baik" yakni sebanyak 46 % atau 23 responden. Menurut responden ini partisipasi masyarakat dalam melaksanakan retribusi kebersihan kota dan pasar hanya dilakukan sepanjang dihimbau dari Pemerintah Daerah, dan belum menjadi budaya masyarakatnya. Selanjutnya sebanyak 28 % atau 14 responden menyatakan "tidak tahu". Sedangkan 26 % atau 13 responden menyatakan "baik" karena menurut responden ini partisipasi masyarakat dalam melaksanakan retribusi kebersihan kota dan pasar, tidak selalu dikarenakan adanya himbauan dari Pemerintah Daerah.

Namun demikian dari perolehan jawaban di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dan pasar kurang baik, karena mayoritas tanggapan responden menyatakan "kurang baik" yakni sebanyak 46 % atau 23 responden. Hal ini sesuai dengan jawaban Bapak Erri, yang mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dan pasar masih kurang, khususnya di kota dan pasar di Kelurahan Bagan Timur".¹⁹

Hal ini didukung oleh jawaban responden lainnya yang mengatakan bahwa "partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dan pasar di daerah ini khususnya di Kelurahan Bagan Timur belum menjadi budaya masyarakatnya". Padahal hal tersebut merupakan modal utama untuk kemajuan untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan.²⁰ Dengan demikian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebersihan kota dan pasar saat ini masih kurang.

Selanjutnya sebagian masyarakat/pedagang berkemungkinan tidak selalu menyetujui jika melakukan gotong-royong atau dilibatkan dalam membersihkan atau memelihara kebersihan kota dan pasar. Namun demikian perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam bidang kebersihan dalam rangka pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, terutama dalam membayar retribusi kebersihan serta menjaga kebersihan kota dan pasar. Sebab pendapatan utama dari Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah berasal dari retribusi masyarakat/pedagang. Sehingga besar

¹⁹ Errie, Plt Kasudin Retribusi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir *Wawancara*, Bagan Timur, 7 Mei 2008.

²⁰ Jefrizal, Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir, *Wawancara*, Bagan Timur, 14 Mei 2008.

kecilnya pendapatan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tergantung pada partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi.²¹

Walaupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di pasar dan membayar retribusi kebersihan kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, tidak menyebabkan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir tidak mengalami kemajuan pembangunan. Sebab dengan pendapatan lainnya seperti pajak, bagi hasil sumber daya alam atau dana perimbangan, masyarakat tetap bisa menikmati pembangunan.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Partisipasi yaitu ikut serta, ikut ambil bagian, dikaji dan segi definisinya, partisipasi merupakan persekutuan yaitu salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara', karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Muslim dan Turmudzi Rasulullah SAW, bersabda:²²

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُم
بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
عن متفق عليه عن أبي موسى رضي الله
عنه . انظر صحيح البخاري الجزء ٢
ص : ٦٧ و صحيح مسلم الجزء ٢ ص : ٤٣١ -

²¹ Yahya K, Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir Wawancara, Bagan Timur, 7 Mei 2008.

²² Zainuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta : CV. Toha Putra, tt), Jilid I, h. 231-232.

Artinya : “Dari Abu Musa Al Asy’ari RA ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda : Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya. Kemudian beliau menelusupkan jari-jari tangan yang sebelah ke jari-jari sebelah lainnya.

Hadist ini dapat dipahami lebih (luas), maka dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk berpartisipasi (ikut serta) antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hal bekerja sama seperti dengan cara membayar retribusi. dan orang-orang yang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin dengan tidak membayar retribusi. Hal ini harus merata baik orang kaya atau orang miskin wajib untuk membayar retribusi.

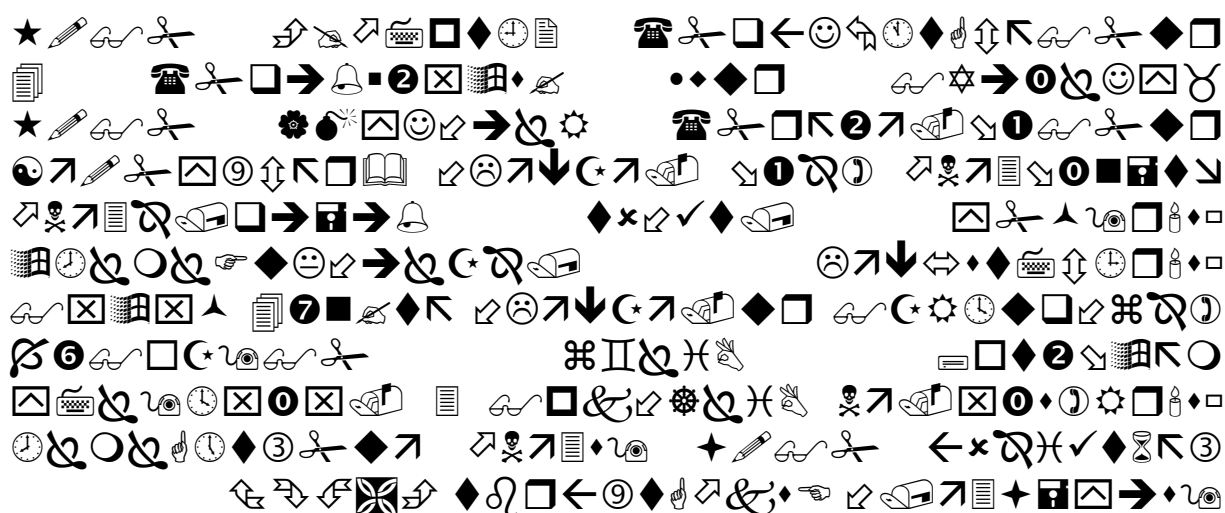
Partisipasi atau ikut serta adalah perbuatan yang terpuji menurut hukum Islam. Salah satu bentuk partisipasi adalah membayar retribusi kepada pemerintah yang merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat, karena pemerintah sudah menyediakan tempat-tempat dan kios-kios buat masyarakat berdagang. maka berdirilah Perda tentang Retribusi yang menjadi dasar hukum untuk kebersihan dan merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut hukum Islam.

Partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, merupakan salah satu bentuk kewajiban sesama masyarakat terhadap retribusi persampahan dan kebersihan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keindahan serta kenyamanan masyarakat. Di sini partisipasi dapat dijelaskan dalam tiga aspek sebagai berikut:

1. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau mengerakkan sumber-sumber dayanya;
2. Masyarakat berpartisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan dan evaluasi);
3. Masyarakat berpartisipasi atau membayarkan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang (masyarakat) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan terhadap pelayanan persampahan dan kebersihan. Melalui partisipasi, masyarakat sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan kepentingan sumber-sumber daya yang dapat digerakkan dan keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi.

Ciri utama retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah kerja sama masyarakat, gotong-royong, dan demokrasi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi filsafah yang mendasari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan itu dapat ditemukan antara lain dalam penekanan pentingnya kerja sama dan keikutsertaan, persaudaraan, dan pandangan hidup demokratis (musyawarah). Ini dapat menimbulkan sifat yang positif terhadap jiwa setiap muslim, yang dapat menjalin persatuan dan persaudaraan umat dengan kokoh, itu hanyalah dapat dilakukan dengan kebaikan sebagai cerminan ketaqwaan kepada Allah SWT²³. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an:



²³. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1998), Cet.ke1, h. 157.

Artinya : “Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah menjinakkan di antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara. (Q.S. Ali Imran : 103).²⁴

Wujud dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerjasama yang dianjurkan sara”, yang disebut juga dengan kewajiban. Retribusi di lain pihak mengandung sifat sukarela. yang dibayar kepada Uli Amri untuk izin usaha dengan mendapat keuntungan bersama. Dalam arti yang paling luas, izin yang dikeluarkan oleh penguasa melalui jasa maka harus dibayar, dan memperoleh manfaat dari situ.²⁵

Sumber retribusi utama berasal dari pedagang atau masyarakat pada khususnya, pembayaran retribusi dari pembersihan sampah-sampah di kios dan penyewaan kios juga retribusi dari pembersihan jualan kaki lima oleh pedagang. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta atau partisipasi yang aktif dari masyarakat tersebut.

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan diberi batas tarif terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan antara legislatif dan eksekutif. Pembayaran retribusi sebagian besar dikenakan kepada masyarakat dan khususnya pedagang berdasarkan besar kecilnya peranan masyarakat dalam pemanfaatan tempat usaha. Misalnya, dalam usaha pada rumah tempat tinggal, tempat usaha umum, seorang masyarakat atau pedagang membayar retribusi sesuai tempat usaha yang dipakainya.

²⁴. Q.S. Ali Imran : 103

²⁵ A. Rahmis, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-4, h. 62.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran atau partisipasi masyarakat atau pedagang dalam membayar retribusi, karena itu dikatakan bahwa retribusi adalah pembayarana iuran kepada pemerintah sebagai balas jasa, bukan pungutan liar. Sebagai pemerintah atau penguasa, retribusi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, retribusi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat persaudaraan diantara sesama masyarakat.²⁶

Menurut A. Rahmis, retribusi merupakan pembayaran sukarela kepada pemerintah (Uli Amri) sebagai tanda jasa yang banyak manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada daerah, membuka lapangan kerja kepada masyarakat, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil PAD untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.²⁷ Dengan demikian jelas, dalam menjalankan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi manusia yang kuat kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta melakukan pungutan retribusi kepada masyarakat dan khususnya para pedagang sesuai tarif yang ditetapkan didalam Perda tersebut. Oleh sebab itu retribusi dapat di benarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip keadilan.

²⁶ M. Ali Hasan, *Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. Ke-3, h. 68.

²⁷ A. Rahmis, *Penjelasan Lengkap...Op.Cit.*, h. 79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, melalui penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dapat dikatakan masih rendah, seperti dalam pembayaran Retribusi Pelayanan kebersihan dan Persampahan, serta membantu membersihkan sampah sesuai kemampuannya masing-masing, membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, memberikan masukan dan kritik dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007.
2. Dampak partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan meskipun telah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, namun prestasi dibidang PAD retribusi yang diraih Pemerintah Daerah Rokan Hilir lebih dominan merupakan hasil kerja Pemerintah Daerah dan belum menjadi budaya masyarakatnya. Dimana pembayaran retribusi baru dibayar ketika petugas jemput bola kepada masyarakat, yakni dijemput baru dibayar. Padahal alangkah lebih baik jika pembayaran retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan di kab. Rohil umumnya dan di Kelurahan Bagan Timur khususnya menjadi budaya masyarakatnya.

3. Partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007, yaitu membayar retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan salah satu bentuk kewajiban sesama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurut pandangan hukum Islam, wujud dari partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerjasama yang dianjurkan syara' yang disebut dengan ikut serta.

B. Saran

1. Kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir agar berkerjasama dengan badan dan kantor yang terkait untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat ke tingkat yang lebih baik.
2. Badan atau kantor yang terkait agar dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pungutan retribusi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjelaskan tentang tujuan pungutan retribusi, serta dalam mengelola uang retribusi yang menyangkut masyarakat umum baik bidang organisasi dan usaha.
3. Para Badan dan kantor yang terkait hendaknya berada lebih dekat lagi dan berusaha untuk menyadarkan dan menjadikan masyarakat mengerti akan pentingnya arti retribusi untuk pembangunan bersama.
4. Kepada masyarakat agar kesadaran dan peran sertanya semakin baik dalam membayar retribusi di Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan tidak memandang pada keuntungan pribadi kebersihan yang sedang dijalankan, tapi keuntungan bersama dari kebersihan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1976).
- A. Rahmis, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002).
- Bintoro Cokro Amidjojo, *Teori Strategis Pembangunan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1993).
- Departemen Agama RI, *Al-Ouran dan Terjemahan*, Bandung. (Bandung : Gema Risalah Press, 1998).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991).
- DR. Sisanto Sunarso, SH, MH, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengeta*, (Bandung : Rineka Cipta, 2005).
- DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Edisi Khusus, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,(Jakarta : CV. Tamita Utama, 2002).
- Eksiklopedi Umum (Yogyakarta : PT Kanisius, 1986).
- Laporan Tahunan Kantor Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2008.
- Nogarsyah Moede, *Bagaimana Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam*, (Bandung : Marjan Bandung, 1993).
- M. Ali Hasan, *Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002).
- Melville C Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995).
- Pandji Anoraga, *Manajemen Perencanaan Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Perda Kabupaten Rokan Hilir. No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Soegarda Poekwadjaya, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1976).

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Y.W. Sunindhia, SH, Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987).

Zainuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta : CV. Toha Putra, tt).

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL II. 1	Banyaknya Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-RW di Kelurahan Bagan Timur Tahun 2008..... 17
TABEL II. 2	Banyaknya Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kelurahan Bagan Timur..... 17
TABEL II. 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Bagan Timur..... 19
TABEL II. 4	Agama yang dianut Penduduk di Kelurahan Bagan Timur..... 20
TABEL II. 5	Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Bagan Timur..... 21
TABEL II. 6	Mata Pencarian Utama Penduduk di Kelurahan Bagan Timur..... 22
TABEL IV. 1	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bagan Timur Ikut Membantu Membersihkan Sampah Sesuai Kemampuannya Masing-Masing, Membuang Sampah pada Waktu dan Tempat yang Sudah disediakan dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2007..... 48
TABEL IV. 2	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bagan Timur dalam

	Pembayaran Retribusi Kebersihan.....	50
TABEL IV. 3	Tanggapan Responden Terhadap Tarif Retribusi Kebersihan yang dibayar Kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.....	52
TABEL IV. 4	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pemerintah yang diberikan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan ...	55
TABEL IV. 5	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan atau Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir kepada masyarakat	57
TABEL IV. 6	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam memberikan Keluhan, Kritikan dan Usulan Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.....	59
TABEL IV. 7	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003- 2007.....	62
TABEL IV. 8	Perkembangan Retribusi yang diperoleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir dari Tahun 2003-2007.....	65
TABEL IV. 9	Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan	

Daerah dan Pasar yang dibangun oleh Pemerintah	
Daerah Kab. Rokan Hilir.....	67

TABEL IV. 10	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi	
	Masyarakat dalam Melaksanakan Kebersihan Kota	
	dan Pasar.....	68

DAFTAR PERTANYAAN

Partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kelurahan Bagan Timur, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan studi, karena itu mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan mengisi setiap pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X)

Soal:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah bentuk partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan?

a. Baikb. Kurang baikc. Tidak baik
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembayaran retribusi?

a. Baikb. Kurang baikc. Tidak baik
3. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang tarif retribusi yang di bayar kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan?

a. Baikb. Kurang baikc. Tidak baik
4. Bagaimana pelayanan yang Bapak/Ibu terima yang diberikan pemerintah?

a. Baikb. Kurang baikc. Tidak baik
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap masyarakat tentang pembinaan atau penyuluhan terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 yang dilakukan oleh pemerintah?

- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapannya tentang masyarakat menyampaikan keluhan, kritikan dan usulan kepada pemerintah?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana terhadap masyarakat tentang pemerintah memperhatikan keinginan, keluhan dan Harapan masyarakat?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang keuntungan pendapatan retribusi dijadikan sebagai tambahan penunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan untuk pembangunan ?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap pembangunan daerah dan pasar di Kelurahan Bagan Timur?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan kota dan pasar?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana ?
- a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah (Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan) Kabupaten Rokan Hilir

1. Bagaimana menurut anda bentuk partisipasi masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007?
2. Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat di daerah ini, khususnya di Kelurahan Bagan Timur dalam meningkatkan sarana dan prasarana?
3. Apakah anda pernah di minta petunjuk serta nasehat oleh masyarakat, atau pedagang dalam pemungutan retribusi kebersihan dan persampahan?
4. Apakah anda memperhatikan keinginan, keluhan dan harapan masyarakat?
5. Apakah anda hanya memberikan arahan-arahan, petunjuk dan nasehat ketika di minta saja?
6. Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat dalam mencapai kebersihan kota dan pasar?
7. Apa saja dampak yang anda rasakan dalam pemungutan retribusi kebersihan dan persampahan di daerah ini?
8. Menurut anda bagaimana pelayanan yang saudara berikan kepada masyarakat?
9. Bagaimana menurut anda bimbingan atau penyuluhan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat?

B. Untuk Masyarakat atau Pedagang

1. Apakah anda pernah diberikan harapan-harapan dan dukungan oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan pertamanan, dalam menyampaikan keluhan tentang pembangunan dan Retribusi?
2. Apakah anda pernah meminta petunjuk dan nasehat kepada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam pungutan retribusi kebersihan dan persampahan di daerah ini?
3. Menurut anda bagaimana dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah?
4. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau pedagang?
5. Menurut anda apakah pemerintah memperhatikan keluhan masyarakat'?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Memperhatikan bentuk kegiatan masyarakat atau pedagang dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007 secara seksama.
2. Melihat manfaat nyata yang ditimbulkan oleh upaya partisipasi masyarakat atau pedagang dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007.
3. Mengamati sikap pemerintah (dalam hal ini Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pedagang .
4. Mengamati apa saja dampak partisipasi masyarakat atau pedagang dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007.
5. Mengamati tentang sikap dan partisipasi masyarakat atau pedagang terhadap Perda No. 3 Tahun 2007.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BANGKO

JALAN GEDUNG NASIONAL TELP. (0767) 21010
BAGANSIAPAPI 28912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ KCB/ SOS/ 2008/ 168.

Camat Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARTUDIANTO
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 10424025084
Jurusan/Prog-Studi : Jinayah Siayasah
Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat Terhadap Perda No.3
Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan
persampahan dan kebersihan ditinjau menurut
Hukum Islam (Studi Kasus di kota Bagansiapiapi
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).

Bahwa nama tersebut diatas benar telah menyelesaikan penelitian pada bulan
Juni 2008 di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan
seperlunya.....

BAGAN 81 Api 7. JUL. 2008.





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KELURAHAN BAGAN TIMUR
KECAMATAN BANGKO
JALAN : P I A H, No....., BAGANSIAPIAPI

REKOMENDASI RISET
No. 26../BT/VI/2008/

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lurah Bagan Timur dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada :

N a m a : ARTUDIANTO
N I M : 10424025084
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Siyasaah Jinayah / Pidana Politik Islam
A l a m a t : Jalan Duyung Gang Almanar No. 34a Pekanbaru

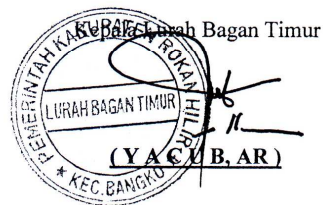
Pelaksanaan Riset berdasarkan Surat Camat Bangko Kabupaten Rokan Hilir No. 420/KCB/SOS/2008/168 Tanggal 07 Juli 2008 akan melakukan Riset untuk bahan Pembuatan Skripsi dengan Judul *Partisipasi Masyarakat* terhadap PERDA No. 3 tahun 2007 tentang Retribusi *Pelayanan Persampahan* dan *Kebersihan* ditinjau menurut Hukum Islam. (studi kasus di kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir) .

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan di maksud dengan ketentuan :

- a. Tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- b. Pelaksanaan Penelitian terhitung sejak dikeluarkannya Surat ini sampai selesai

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAGAN TIMUR
PADA TANGGAL : JULI 2008



Tembusan :

1. Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KANTOR SATPOL PP, LINMAS DAN KESBANG

Jl. Aman No. 10 Telp. (0767) 21130 Bagansiapiapi – 28914 Fax (0767) 21130

Bagansiapiapi, 6 Juni 2008

Nomor : 070/PPLK/2008/103
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Pasar dan Pertamanan
Kabupaten Rokan Hilir
2. Kantor Camat Bangko
3. Kantor Lurah Bagan Timur
Kecamatan Bangko
di
Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Kepala Kantor Satpol PP, Linmas dan Kesbang Kabupaten Rokan Hilir, setelah membaca surat permohonan Rekomendasi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1558/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada :

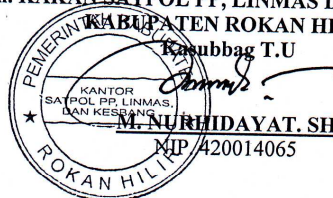
Nama : **ARTUDIANTO**
NIM : 10424025084
Jurusan : Jinayah Siyayah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tentang : “ **Partisipasi Masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil)** “.

Penelitian dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada Kakan Satpol PP, Linmas dan Kesbang Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 (satu) eksamplar.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. **KAKAN SATPOL PP, LINMAS DAN KESBANG**
KABUPATEN ROKAN HILIR



Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Badan Infokom dan Kesbang Provinsi Riau
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KESATUAN BANGSA
Jl. Cut Nyak Dien II/2 Telp. (0761) 23740 - 38736 Fax. 38736
PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

NO. : 070/BIKKB/01489 / 2008

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Dengan hormat,

Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset Rektor Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1558/2008 Tanggal 13 Mei 2008

dengan ini memberi Rekomendasi kepada :

Nama : ARTUDIANTO
Nomor Mahasiswa : 10424025084
Fakultas/Jurusan : Jinayah Siyasaah
Alamat : Pekanbaru
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat terhadap PERDA No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus di Kota Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko Kab.Rohil

Untuk melakukan penelitian di : 1. Ktr.Bupati Rohil 2. Ktr.DPRD Rohil 3. Ktr.Dinas Pasar dan Pertamanan Rohil 4. Perpustakaan Wil.Riau 5. Ktr.Lurah Bagan Timur Rohil 6. Ktr.Kjec.Bangko Rohil

Dengan ketentuan sebagai berikut:

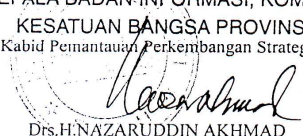
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset ini, dan terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 16 Mei 2008

An. KEPALA BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
KESATUAN BANGSA PROVINSI RIAU
Kabid Pemantauan Perkembangan Strategis


Drs. H. NAZARUDDIN AKHMAD
Pembina Tk.I NIP. 010102908

Rekomendasi ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Satpol, Linmas dan Kesbang di Bagan Siapi-Api
2. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN
Suska Riau Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan